

PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI BERDASARKAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DI INDONESIA

Khoirul Anam¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : khoirulanammlg31@gmail.com

ABSTRACT

Environmental pollution contained in Article 88 of Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management, namely "Every person whose actions, businesses and / or activities use B3, produce and / or manage B3 waste, and / or which pose a serious threat to the environment is absolutely responsible for losses incurred without the need to prove the element of error. In this case, it can be done by a person or corporation, the pollution caused can be resolved with the principle of absolute responsibility, namely the plaintiff without the need to prove the element of the defendant's guilt.

Key words: *environmental pollution, absolute responsibility, corporation*

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan yang terdapat pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu “*Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan*”. Dalam hal ini bisa dilakukan oleh orang atau korporasi, pencemaran yang ditimbulkan bisa diselesaikan dengan asas tanggungjawab mutlak yakni penggugat tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan tergugat.

Kata Kunci : *pencemaran lingkungan, tanggungjawab mutlak, korporasi*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menyikapi segala persoalan negara haruslah berlandaskan hukum bukan dengan sewenang-wenang. Berkembangnya masyarakat menjadi penting untuk penyesuaian hukum itu sendiri. hukum berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, awalnya hukum hanya diciptakan sebagai tujuan dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat.²Setiap umat manusia selama hidupnya adalah orang, adalah subyek hukum. Sejak lahir manusia telah melekat hak dan kewajiban. Dengan pola pikir masyarakat hingga menjadikan orang bukanlah satu-satu pengemban hak dan kewajiban. Yakni terdapat badan hukum yang dibentuk seperti layaknya orang. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban misalnya negara dan perseroan terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum.³

Badan hukum inilah yang menjadi subyek hukum kedua setelah orang, maka dapat disimpulkan bahwa, badan hukum juga mempunyai hak serta kewajiban yang diberikan oleh undang-undang. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁴

Banyak perusahaan yang bergerak di bidang industri, perusahaan yang berbadan hukum ini memiliki izin untuk mendirikan perusahaan dengan kewajiban untuk tidak melakukan pencemaran lingkungan. Usaha-usaha industri ini dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu : Industri besar, Industri kecil dan Industri sangat kecil Pengelompokkan usaha industri ke dalam tiga jenis itu berdasarkan pada nilai kekayaan (*assets*) tapi tidak termasuk didalamnya nilai rumah dan tanah yang ditempati.

Seringkali korporasi mengabaikan kewajibannya untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan sehingga mengakibatkan pencemaran yang sangat besar baik dari kuantitas maupun kualitas pencemarannya. Pencemaran yang dihasilkan oleh Korporasi pasti jauh lebih besar yang dilakukan oleh manusia.

Yang dimaksud korporasi ialah suatu gabungan orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama sebagai satu subyek hukum terdiri (personifikasi). Korporasi merupakan badan hukum yang merupakan badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak/kewajiban sendiri.⁵

²Sudikno Mertokusumo, (2008), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta ; Liberty, h. 40.

³*Ibid.* 74.

⁴*Ibid.* 43.

⁵ R Soeroso, (2016), *Pengantar Ilmu Hukum*, jakarta :sinar grafika. h 241.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), yakni segala sesuatu yang dituntut karena pencemaran lingkungan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atau ganti rugi. Asas tanggung jawab mutlak ini merupakan prinsip pertanggungjawaban hukum yang telah berkembang sejak lama, yakni berasal dari sebuah kasus di Inggris (*Rylands v. Fletcher*) pada tahun 1868.⁶

Sebagai wujud dari pertanggungjawaban mutlak ini dapat kita temui dalam Pasal 88 UUPPLH, yang berbunyi :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat terjadinya pencemaran ini, dapat menggugat namun tidak dibebani pembuktian unsur kesalahan. Dalam penjelasan Pasal 88 yang berbunyi sebagai berikut:

‘Yang dimaksud dengan bertanggungjawab mutlak atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi’. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur tentang hak gugat yang dimiliki oleh warga negara dan pemerintah provinsi maupun daerah. Oleh sebab itu, warga negara perorangan sekalipun atau kelompok dapat menggugat apabila menjadi korban pencemaran lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut; Bagaimana proses penyelesaian sengketa perdata pemberian ganti rugi oleh korporasi akibat pencemaran lingkungan menurut *asas strict liability* di Indonesia? Bagaimana proses pertanggungjawaban pidana oleh korporasi menurut *asas strict liability* akibat terjadinya pencemaran lingkungan di Indonesia?

Tujuan penelitian yaitu Untuk memahami proses penyelesaian sengketa perdata pencemaran lingkungan menurut *asas strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk memahami proses pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang menyebabkan pencemaran lingkungan

⁶ Koesnadi Harjasoemantri . (1998), *Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)*. Jakarta; Loka karya and Class Action, h. 1.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Manfaat yang diberikan dari penelitian yaitu Untuk mengetahui secara jelas proses penyelesaian sengketa serta ganti rugi menurut *asas strict liability* oleh korporasi akibat pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia. Untuk mengetahui secara jelas proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi akibat pencemaran lingkungan menurut *asas strict liability*.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau data normatif dilakukan mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus Hukum (*Case Aproach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Pemberian Ganti Rugi Oleh Korporasi Akibat Pencemaran Lingkungan Menurut *Asas Strict Liability*

Korporasi mempunyai tanggungjawab secara perdata, pidana dan administrasi. Tanggungjawab perdata yakni salah satunya adalah ganti rugi akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan dapat dilakukan melalui pengadilan umum dan pengadilan administrasi (TUN). Mekanisme pengadilan umum diatur dalam pasal 87-92 UUPPLH-2009, sedangkan mekanisme pengadilan TUN diatur dalam Pasal 93 UUPPLH-2009 jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.⁷

Berperkara di pengadilan secara perdata bertujuan untuk menuntut ganti kerugian atas dan pemulihan lingkungan atas dasar perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup.hal ini diatur dalam pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang menyebutkan:

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

⁷ Muhammad Akib, (2016), *hukum lingkungan perspektif global dan nasional*, jakarta. Rajawali pers. h.232

Didalam sengketa pencemaran lingkungan ini lebih membahas kepada tanggungjawab mutlak yang artinya pihak pengugat tidak perlu membuktikan kesalahan pihak tergugat namun pihak tergugat lah yang harus membuktikan apakah pengugat benar-benar tidak bersalah. Hal ini berbanding terbalik dengan sengketa lainnya karena dalam tanggungjawab mutlak pihak penggugat diberi keringanan untuk tidak membuktikan dari kesalahan pihak tergugat.

1. kewenangan mengugat

a. Masyarakat atau warga negara

masyarakat memiliki Hak gugat yang tertuang dalam Pasal 91 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”

b. Pemerintah dan pemerintah daerah

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran sentral untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup sekitar. Melindungi dalam hal ini termasuk menghukum atau memberikan sanksi administratif bagi setiap korporasi yang melanggar hukum. Secara eksplisit telah disebutkan tentang tugas pokok dan fungsi pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola lingkungan hidup. Hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 90 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan bagi setiap kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

c. Organisasi lingkungan

Organisasi ini diakui menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH, dalam Pasal 92 yang menentukan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

3. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. Berbentuk badan hukum
- b. Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun.

2. Gugatan

a. Gugatan *kontentiosa*

Gugatan *kontentiosa* inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik, sedangkan penggunaan gugatan *kontentiosa*, lebih bercorak pengkajian teoritis untuk membedakannya dengan *voluntair*.⁸ Gugatan ini dapat dilakukan oleh para pihak yang merasa menjadi korban pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh korporasi dengan dua cara sebagai berikut: lisan dan tertulis.

b. Gugatan *Class Action*

Gugatan *class action*, dalam hukum lingkungan keperdataan tidak selalu terdapat sengketa lingkungan antar individu, tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui gugatan kelompok (*class action*).⁹ Masyarakat yang merasa dirugikan akibat pencemaran lingkungan, dijamin oleh undang-undang, dapat mengajukan gugatan secara kelompok, hal ini merupakan hal yang baik, dikarenakan gugatan ini mengatas namakan masyarakat banyak, dan mempunyai hubungan keterkaitan antara kerugian yang dirasakan secara kolektif.

3. proses Acara Pembuktian

2,1 Tanggung Gugat Berdasarkan Kesalahan

Konsep tanggung gugat berdasarkan kesalahan ini mengandung arti bahwa tergugat bertanggung gugat apabila ia dapat dibuktikan bersalah. Namun sebaliknya, apabila tergugat tidak dinyatakan bersalah maka tergugat dinyatakan lepas atau bebas dari pertanggung gugatan perdata. Sederhananya, dalam penyelesaian perkara lingkungan akibat pencemaran, tergugat dalam hal ini korporasi apabila terbukti melakukan pencemaran karena kesalahannya maka tergugat dinyatakan bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi.

⁸ Yahya Harahap, (2017), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 48.

⁹ Muhammad Akib, *Op.cit.* h. 194.

2.2 Tanggung Gugat Berdasarkan Kesalahan Dengan Pembuktian Terbalik

Rudiger Lummert mengemukakan bahwa dengan berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan risiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab-akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep “kesalahan” dan berpaling ke konsep “risiko”. Perkembangan industri modern telah membawa serta sejumlah risiko (pencemaran) yang terjadi setiap hari, yang tidak dapat dihindari dari sudut ekonomi. Ia telah menimbulkan derita dan kerugian bagi si penderita, hal tersebut tidak dapat ditanggungnya tanpa suatu ganti kerugian. Atas dasar realitas ini, sejak pertengahan abad ke-19, asas tanggung jawab mutlak (strict liability) telah diperkenalkan, sekurang-kurangnya untuk beberapa macam kasus, yang sebagian besar adalah berkaitan dengan risiko lingkungan.¹⁰

Konsep tanggung jawab mutlak diartikan sebagai kewajiban mutlak yang berhubungan dengan timbulnya kerusakan lingkungan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak adalah tidak adanya persyaratan tentang perlu adanya kesalahan.¹¹ Konsep ini, menurut James E. Krier merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena banyak kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya, namun hal itu sulit sekali dibuktikan kesalahannya.¹²

Oleh karenanya, dalam kasus seperti itu seyogyanya dapat diberlakukan ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) yang merupakan penyimpangan dari asas “tanggung jawab penuh” (absolute liability) yang umumnya dianut dalam hukum acara perdata atau pidana kita. Berdasarkan konsep “tanggung jawab mutlak”.

Menurut Munadjat Danusaputra disebut asas “tanggung jawab langsung dan seketika”, yakni kewajiban membayar kerugian timbul segera (seketika) setelah terjadinya kerugian, dengan tidak mempersoalkan salah tidaknya penyebab kerugian tersebut.¹³ Dengan adanya pembalikan beban pembuktian ini, maka masalah beban pembuktian tidak merupakan halangan bagi korban pencemaran lingkungan atau bagi pecinta “lingkungan baik dan sehat” untuk berperkara di depan pengadilan sebagai penggugat, karena adalah tanggungjawab dari tergugat untuk membuktikan bahwa aktivitasnya tidak menimbulkan gangguan berupa pencemaran lingkungan.¹⁴

¹⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, 1989, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

¹¹ Abdul Rokhim, *Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Ilmiah “Dinamika Hukum”, FH Unisma Malang, ISSN: 0854- 7254, Vol. VII No. 14, Agustus 2001, h. 44-51

¹² Krier, James E., 1970, “Environmental Litigation and the Burden of Proof” dalam *Law and the Environment*, Walker Publishing Co., New York.

¹³ Abdurrahman, 1986, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.

¹⁴ Abdul Rokhim. *Op.cit.*

2,3 Tanggung Gugat Mutlak (*strict liability*)

Tanggung gugat mutlak (*strict liability*) mengandung makna bahwa tanggung gugat timbul seketika pada saat terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat.¹⁵ Dalam hal pencemaran lingkungan laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, ketentuan *strict liability* ditentukan dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia menegaskan: “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8, dan dengan memerhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barang siapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumberdaya alam memikul tanggungjawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan atau sumberdaya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah memadai”

2,4 Tanggung Gugat Bersama

Secara teoritis, konsep ini hadir untuk membebankan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh lebih dari satu tergugat, beban ganti ruginya pun dibebankan secara kolektif. Penggugat sendiri umumnya tidak bisa mendalilkan secara spesifik terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan.

2,5 Tanggung Gugat Berdasarkan Andilnya Dalam Pencemaran

Konsep atau teori ini ternyata belum diatur dalam UUPPLH-2009 maupun peraturan perundang-undangan lingkungan lainnya. Melainkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagukliran mengatur mengenai hal ini, yang dalam Penjelasan Pasal 30 mengatur mengenai tanggung gugat berdasarkan andilnya dalam pencemaran.

4. Sanksi dan Ganti Rugi Untuk Pelaku Pencemaran

Tahap akhir dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan berakhir dengan putusan untuk para pihak yang sebelumnya telah membuktikan kebenaran dalilnya dengan alat bukti berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Hakim akan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat bukti dalam persidangan. Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur upaya ganti rugi, yakni dalam Pasal 87 ayat (1), yakni sebagai berikut:

1. Ganti rugi kepada orang yang menderita kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
2. Ganti rugi kepada lingkungan hidup itu sendiri

¹⁵ Muhammad Akib, (2016), *hukum lingkungan perspektif global dan nasional*, jakarta. Rajawali pers. h. 187.

Disisi lain Undang-undang juga memberikan opsi sanksi berupa tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:¹⁶

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup dan atau Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Proses Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi

Terjadi perbedaan antara kata “hukum pidana lingkungan” dan “hukum lingkungan kepidanaan” antara para ahli. Pakar hukum pidana Loebby Luqman, dalam suatu seminar lingkungan di Jakarta, ditegur oleh Koesnadi Hardjasoemantri karena menggunakan istilah “hukum pidana lingkungan”, menurut Koesnadi, tidak ada istilah hukum pidana lingkungan, yang ada segi-segi kepidanaan hukum lingkungan (*strafrechtelijk milieurecht*).¹⁷

Menurut Andi Hamzah apabila kita menulis tentang “Hukum Lingkungan” maka di dalamnya memuat segi-segi administratif, dan segi-segi keperdataan hukum dan segi-segi kepidanaan, tetapi jika kita menulis hanya bagian kepidanaan itu saja maka tidaklah keliru jika kita menyebut hukum pidana lingkungan.¹⁸

Ketentuan hukum lingkungan dalam UUPPLH-2009 misalnya, memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan dengan hak, kewajiban, dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan salah satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan lingkungan dalam undang-undang tersebut.¹⁹

Dalam ketentuan pidana lingkungan dapat kita lihat dalam pasal 97 sampai pasal 120 UUPPLH, bahwa dalam pasal tersebut disebutkan ancaman sanksi pidana dan denda, dalam hal ini penyusun lebih memfokuskan kepada ketentuan pidana hukum lingkungan yang menggunakan B3, bisa disebut juga pertanggungjawaban mutlak.

Pasal 102 sampai pasal 107 UUPPLH mengatur tentang pemidanaan yang menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan memasukan B3 ke wilayah Indonesia. Dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 15 tahun, dan juga dikenakan sanksi denda 1 miliar sampai 15 miliar rupiah. Dan juga bagi korporasi atau badan usaha dapat dikenakan sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 119 UUPPLH huruf b

¹⁶Penjelasan, Pasal 87 ayat (1) UUPPLH-2009

¹⁷Andi Hamzah, (2005), *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 108.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹ Muhammad Akib, (2016), *hukum lingkungan perspektif global dan nasional*, Jakarta: Rajawali Press, h. 175.

yaitu penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan dan huruf e yaitu penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

1. Tahap Penyidikan

Dalam kajian hukum pidana dan hukum acara pidana, sering dikaitkan dengan Sistem Pidana Terpadu, dalam KUHAP sendiri diatur bahwa setiap proses penegakan hukum pidana dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Proses penyelidikan Kepolisian memegang peranan penting dalam hal ini, namun selain penyidik dari pejabat kepolisian, terdapat pula penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik. Hal ini terdapat dalam Pasal 94 ayat 1 UUPPLH-2009. Tentu dengan fungsi “Koordinasi dan Pengawasan” (Korwas) pelaksanaan tugas pokok penyidikan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dengan Penyidik Polri dapat berjalan selaras dan harmonis.

Uraian peraturan diatas menjadi jelas bahwa penyidik kepolisian dan penyidik PPNS kementerian lingkungan hidup mempunyai tanggung jawab bersama dan saling berkoordinasi, dalam Pasal 95 UUPPLH disebutkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

2. Delik Tindak Pidana Lingkungan

Pada Pasal 98 dan 99 UUPPLH-2009 merumuskan delik lingkungan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Selain itu perbuatan tersebut dapat juga mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang. Sementara Pasal 112 merumuskan delik lingkungan sebagai “kesengajaan pejabat berwenang tidak melakukan pengawasan yang berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Dalam delik pidana lingkungan khususnya pasal 88 UUPPLH tentang tanggungjawab mutlak bahwa menyebutkan kerugian atas kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Dalam ini penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan orang atau korporasi yang melakukan

pencemaran akan tetapi tergugatlah yang harus membuktikan kalau tergugat tidak bersalah hal ini juga dapat disebut pembuktian terbalik.

3. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Kasus Pencemaran lingkungan Oleh Korporasi

a. Tahap Penyidikan

Dalam penyidikan tindak pidana di lingkungan hidup, di dalam UUPPLH telah mengatur secara khusus tentang penyidik PPNS dalam proses penyidikan, yakni harus saling berkoordinasi dengan penyidik POLRI dalam melakukan penahanan. Dalam proses pemeriksaan dan penyidikan dibuatkan berita acara sesuai dengan Pasal 75 KUHAP dan setiap masing-masing berita acara ditandatangani oleh penyidik PPNS dan ditandatangani oleh pihak yang terkait.

Terdapat perbedaan proses penyidikan guna mengumpulkan alat bukti, yakni perihal menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum, bahwa berdasarkan sistem KUHAP penyidik PPNS tidak berwenang menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum. Namun dalam UUPPLH Pasal 94 ayat (6) menyatakan hasil penyidikan yang telah dilakukan penyidik PPNS disampaikan kepada penuntut umum.

Dengan demikian penyidik PPNS lingkungan hidup dapat berwenang untuk menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung tanpa melalui perantara POLRI. Tahap penyidikan diakhiri dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, namun apabila tidak cukup alat bukti atau bukan merupakan tindak pidana maka dihentikan demi hukum sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

b. Tahap Penuntutan Perkara

Secara umum tahap penuntutan kasus di bidang lingkungan hidup yaitu:

1. Tahap pra penuntutan yang meliputi
 - a. Penelitian, berkas kelengkapan hasil penyidikan dari penyidik PPNS.
 - b. Terdapat dua alternatif, apabila berkas lengkap maka dilanjutkan untuk di buat surat tuntutan namun apabila tidak lengkap maka dikembalikan kepada penyidik dengan memberikan petunjuk untuk menyempurnakan hasil penyidikan.
 - c. Melakukan pemeriksaan ulang, jika terdapat saksi-saksi dan barang bukti dan melakukan gelar perkara.
2. Tahap penuntutan, yang meliputi :
 - a. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dapat dilakukan penuntutan, dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan Pasal 140 KUHAP.

b. Pelimpahan perkara oleh jaksa Penuntut umum ke Pengadilan Negeri

c. Pemeriksaan di Pengadilan, Putusan Hakim dan Upaya Hukum

Secara umum pemeriksaa perkara lingkungan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan di sidang pengadilan, yang meliputi pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa atau penasehat hukumnya, pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut umum, pembelaan dari terdakwa, replik jaksa dan duplik dari terdakwa/penasehat hukum.
2. Setelah proses pemeriksaan telah dinyatakan selesai maka hakim menjatuhkan putusan, yang dapat berupa putusan bebas sesuai Pasal 190 ayat (1) KUHAP, putusan lepas dari segala tuntutan hukum Pasal 190 ayt (2) KUHAP, dan dijatuhi pidana Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Terhadap putusan yang dijatuhi hukuman pidana berhak melakukan upaya hukum biasa, berupa kasasi (Pasal 244 KUHAP) dan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan umum Pasal 259 ayat 1 KUHAP, serta peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 ayat 1 KUHAP.

3. Terhadap putusan yang dijatuhi hukuman pidana berhak melakukan upaya hukum biasa, berupa kasasi (Pasal 244 KUHAP) dan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan umum Pasal 259 ayat 1 KUHAP, serta peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 ayat 1 KUHAP.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup salah satunya ialah segi keperdataan. Hal ini dijamin oleh Undang-undang dalam hal penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan oleh korporasi yang menurut pasal 88 UUPPLH menggunakan B3 (bahan berbahaya dan beracun), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian terjadi, yang dimaksud tanggungjawab mutlak adalah penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat. Bagi masyarakat, pemerintah daerah maupun pusat dan lingkungan yang merasa dirugikan akibat pencemaran pencemaran tersebut dapat mengajukan gugatan, dalam mengajukan gugatan ini bisa dilakukan melalui beberapa jenis

gugatan yaitu gugatan kontentiosa dan gugatan *class action*, dalam hal ini korporasi yang terbukti bersalah dapat di kenakan sanksi administrasi dan ganti rugi menurut pasal 87 ayat 1 UUPPLH.

2. Bagi setiap korporasi yang berbadan hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila terbukti melakukan pencemaran, termasuk pemberi perintah atau pengurus yang mewakili korporasi. Dalam pertanggung jawaban pidana sudah diatur dalam pasal 97-120 UUPPLH didalam undang-undang menyebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha yang melanggar akan terkena sanksi pidana dan denda. Proses penyelesaian perkara pidana mempunyai perbedaan, yakni penyidik PPNS dapat memberikan secara langsung kepada Jaksa Penuntut umum untuk segera di proses, selain itu bagi badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan penempatan perusahaan dibawah pengampuan.

Saran

Saran yang dapat penyusun berikan mengenai hasil putusan Mahkamah Konstitusi ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR dapat melakukan evaluasi mengenai permasalahan pembuktian di lapangan di lingkup keperdataan, karena secara jelas banyak dirugikan ialah masyarakat atau sekelompok masyarakat yang awam akan tentang lingkungan atau kadar pencemaran lingkungan.
2. Untuk pemerintah dan DPR untuk segera melakukan evaluasi mengenai sanksi untuk badan hukum yang melanggar agar diberikan sanksi pencabutan izin dan upaya tutup paksa bagi perusahaan yang melanggar, hal ini disyaratkan agar para pelaku usaha lebih berhati-hati mengelola lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

BUKU

Harjasoemantri, Koesnadi . 1998, *Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)*. Jakarta; Loka karya.

Krier, James E., 1970, "Environmental Litigation and the Burden of Proof" dalam *Law and the Environment*, Walker Publishing Co., New York.

Akib, Muhammad. 2016, *hukum lingkungan perspektif global dan nasional*, jakarta; Rajawali pers.

Soeroso, R. 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, jakarta ;sinar grafika.

Mertokusumo, Sudikno. 2008, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta ; Liberty.

Harahap, Yahya. 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta; Sinar Grafika,

JURNAL

Rokhim, Abdul. 2001, *Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Ilmiah "Dinamika Hukum", FH Unisma Malang, ISSN: 0854- 7254, Vol. VII No. 14.

